

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ekonomi dan transaksi bisnis menyebabkan semakin tinggi dan kompleksnya risiko bisnis yang harus dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola segala risiko yang mungkin dihadapi. Penerapan sistem *risk management* merupakan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko perusahaan. Apabila sistem *risk management* dilakukan dengan efektif, maka hal tersebut dapat memperkuat pelaksanaan *good corporate governance*.

Terungkapnya kasus-kasus keuangan perusahaan besar yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan membuat standar pelaporan akuntansi di dunia semakin berkembang. Kasus yang terjadi pada perusahaan Lehman Brothers dan krisis keuangan global pada tahun 2008 di Amerika Serikat sebagai akibat dari kegagalan dalam pembayaran kredit perumahan (*subprime mortgage*) juga mendorong penerapan *good corporate governance* pada perusahaan dengan lebih memperhatikan penerapan manajemen risikonya sehingga kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat dicegah.

Di Indonesia beberapa kasus juga pernah terjadi karena kurangnya mekanisme pengelolaan risiko dengan tepat, seperti yang dialami oleh PT Kimia Farma pada tahun 2001 yang ditemukan adanya kecurangan pada laporan keuangan, dan tahun 2005 terjadi lagi kasus kecurangan laporan keuangan pada PT. KAI. Tahun 2010 beberapa perusahaan dari Group Bakrie

dihadapi dengan permasalahan karena adanya perbedaan pencatatan pada laporan keuangan dengan kenyataannya (Hadiani, 2016).

Kasus-kasus tersebut terjadi karena perusahaan tidak memiliki *corporate governance* yang baik serta lemahnya pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi dengan lebih transparan termasuk pengungkapan terkait risiko perusahaan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016).

Penyebab lain terjadinya kasus tersebut adalah karena adanya konflik kepentingan. Pihak *principal* berkepentingan agar risiko yang dihadapi perusahaan dapat seminimal mungkin, sementara pihak *agent* berkepentingan mendapatkan penilaian yang baik dari pihak *principal*. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak *agent* adalah dengan melakukan kecurangan dalam penyusunan pelaporan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena pihak *agent* mengetahui lebih banyak informasi perusahaan bila dibandingkan dengan pihak *principal* (Sari, 2013).

Kasus kecurangan dalam penyusunan pelaporan keuangan berdampak pada berkurangnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap keandalan dan keakuratan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan tetapi hanya disusun sesuai dengan standar dan aturan akuntansi. Hal ini menimbulkan semakin banyaknya permintaan dari para *stakeholder* agar perusahaan-perusahaan melakukan perluasan wilayah pengungkapannya dalam laporan keuangan (Anisa, 2012).

*Risk Management Disclosure* (RMD) merupakan salah satu perangkat utama untuk dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik dan membantu mengontrol aktivitas manajemen sehingga kecurangan dalam penyusunan pelaporan keuangan dapat dicegah atau diminimalisir. Penerapan *risk management disclosure* ini erat kaitannya dengan penerapan *good corporate governance*, yaitu prinsip transparansi yang menuntut diterapkannya *enterprise-wide risk management* (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Menurut teori sinyal, penerapan *risk management disclosure* merupakan salah satu sinyal dari perusahaan yang memberikan informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* yang mengartikan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan prinsip transparansi (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

*Risk management disclosure* merupakan pengungkapan atas pengelolaan risiko-risiko yang dilakukan oleh perusahaan atau bagaimana perusahaan mengelola risiko yang akan dihadapi di masa mendatang (Fathimiyah, dkk., 2012). Dengan adanya *risk management disclosure*, komunikasi antara *stakeholder* dengan manajemen perusahaan menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi adanya asimetri informasi antara *principal* dengan *agent*. Selain itu, pengungkapan *risk management* juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor maupun kreditor. Dalam pengungkapan risiko, informasi yang

disampaikan baik informasi yang bersifat positif maupun negatif harus disajikan secara seimbang supaya tujuan perusahaan dapat tercapai (Sulistyaningsih, 2015).

Peraturan mengenai *risk management disclosure* di Indonesia terdapat pada PSAK 60 revisi 2014, yang berisi tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko instrumen keuangan. Peraturan lain yaitu peraturan Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Tujuan dari pembuatan peraturan tersebut adalah sebagai pedoman perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan tidak hanya melaporkan informasi terkait keuangan saja, namun juga mengungkapkan risiko yang ada dalam perusahaan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016).

Praktik mengenai *risk management disclosure* juga sangat dianjurkan dalam islam. Allah SWT memerintahkan bahwa sesama manusia tidak boleh saling merugikan dan mengurangi hak-hak satu sama lain dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan di bumi. Anjuran tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara' ayat 183 yang berbunyi:

وَلَّ تَبَخَّسُوا النَّاسَ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. Asy\_Syu’ara’: 183)

*Principal* sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan memiliki hak untuk mengetahui kemungkinan berbagai macam risiko yang akan dihadapi dan dapat mengancam keberhasilan perusahaan. Risiko merupakan bahaya atau kerugian yang telah, sedang, maupun akan dihadapi oleh perusahaan. Sehingga, agar tidak mengurangi hak-hak para *principal*, maka praktik pengungkapan manajemen risiko menjadi penting untuk dilakukan.

Ada beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap *risk management disclosure*. Faktor yang pertama adalah kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Perusahaan dengan kepemilikan institusional akan memiliki struktur kepemilikan yang terpusat sehingga mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan dengan lebih aktif agar perilaku *opportunistic* manajer dapat dicegah melalui *risk management disclosure*. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fathimiyah dkk., (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Widiastuti (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Faktor yang kedua adalah ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah dari dewan komisaris yang berada di perusahaan. Menurut Putri dan Widiastuti (2015) jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan setidaknya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan jumlah anggota dewan direksi. Anggota dewan komisaris yang semakin besar akan berdampak pada kualitas dan fungsi pengawasan terhadap keputusan yang diambil, sehingga dapat meningkatkan *risk management disclosure* oleh manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris yang besar kurang efektif dalam pengawasan perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Putri dan Widiastuti (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sistem manajemen risiko dapat berjalan efektif dengan aspek pengawasan yang baik.

Faktor ketiga yang diduga memengaruhi *risk management disclosure* adalah reputasi auditor. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor dengan reputasi dan keahlian yang baik dinilai memiliki kualitas penilaian dan pengawasan risiko yang lebih tinggi. Auditor dengan reputasi yang baik seperti *big four* dipandang dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan auditor *non-big four*. Selain itu, perusahaan yang diaudit *big four* mendapat tekanan yang lebih besar untuk menerapkan dan mengungkapkan RMD (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Syifa' (2013) menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap

pengungkapan *risk management disclosure*. Sementara penelitian Kumalasari dkk., (2014) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap *risk management disclosure* adalah ukuran perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan pengungkapan risiko semakin luas sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap investor, sehingga ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan *risk management disclosure* (Anisa, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syifa' (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *risk management disclosure*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Prayoga (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Faktor kelima yang mungkin memengaruhi *risk management disclosure* adalah *leverage*. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka pihak kreditur akan meminta transparansi informasi yang semakin besar pula, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka akan menyebabkan semakin luasnya tingkat *risk management disclosure*. Hal ini membuat hubungan antara *leverage* dengan *risk management disclosure* berpengaruh positif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syifa' (2013) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Kumalasari, dkk. (2014) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini penelitian mengenai pengungkapan risiko masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau masih terdapat perbedaan. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan sampel maupun metode yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap *Risk Management Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2015)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Syifa' (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel, sampel dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2015.

Penelitian ini menghilangkan dua variabel bebas yang ada di penelitian sebelumnya. Kemudian pada penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris. Penambahan variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Widiastuti (2015).

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang akan diteliti dan diduga memengaruhi RMD, yaitu: kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *risk management disclosure*?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk management disclosure*?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *risk management disclosure*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *risk management disclosure*?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *risk management disclosure*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *risk management disclosure*.

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *risk management disclosure*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh reputasi auditor terhadap *risk management disclosure*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *risk management disclosure*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *risk management disclosure*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi mengenai *risk management disclosure*.

##### 2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusin informasi kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *risk management disclosure*, sehingga informasi tersebut dapat membantu manajer perusahaan dalam membuat kebijakan, mengelola risiko dan

memperbaiki kualitas pengungkapan risiko perusahaan. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan terkait investasi dan kredit kepada perusahaan yang memiliki pelaporan risiko.